

Bahasa, Identitas, dan Iman: Pergeseran Bahasa Melayu dalam Bayang-Bayang Ideologi Agama di Kota Duri

Kasmuri Kasmuri, Usman Usman, Imam Hanafi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia, Indonesia

* imam.hanafi@uin-suska.ac.id

Received: 11 April 2025; Revised: 28 May 2025; Accepted: 1 July 2025

Available online: 2 July 2025

How to cite (APA): Kasmuri, K., Usman, U., & Hanafi, I. (2025). Bahasa, Identitas, dan Iman: Pergeseran Bahasa Melayu dalam Bayang-Bayang Ideologi Agama di Kota Duri. *HUMANIKA*, 32(1), 115.
<https://doi.org/10.14710/humanika.v32i1.72386>

Permalink/DOI: 10.14710/humanika.v32i1.72386

Abstract

This research explores the phenomenon of a Malay language shift in Duri City, Bengkalis Regency, within a multi-ethnic and multi-religious society. This shift is driven not only by demographic changes, such as the large-scale migration of Minangkabau, Batak, and Javanese communities, but also by ideological dynamics embedded in the language itself. Once a symbol of Malay-Islamic culture and civilization, the Malay language has increasingly become associated with specific religious identities. This exclusivist framing led to resistance from non-Muslim groups. Using a qualitative-descriptive method and critical sociolinguistic approach, this study demonstrates that the Malay language has lost its inclusive communicative function. Instead, it has evolved into a symbolic marker that generates social boundaries and constructs identity. Drawing on theories of language ideology (Irvine & Gal, 2000) and linguistic capital (Bourdieu), this research finds that language choice in Duri's public space is no longer merely pragmatic. It functions as a means of representing and symbolizing resistance to perceived cultural domination. This study recommends a reorientation of language ideology and the implementation of policies to revitalize the Malay language as a symbol of inclusive culture—one that transcends religious and ethnic divides.

Keywords: Malay language; language shift; language ideology; identity

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena pergeseran bahasa Melayu di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis, dalam masyarakat yang multi-etnis dan multi-agama. Pergeseran ini didorong tidak hanya oleh perubahan demografis, seperti migrasi besar-besaran komunitas Minangkabau, Batak, dan Jawa, tetapi juga oleh dinamika ideologis yang melekat pada bahasa itu sendiri. Dahulu menjadi simbol budaya dan peradaban Melayu-Islam, bahasa Melayu kini semakin diasosiasikan dengan identitas keagamaan tertentu. Pembingkaihan yang eksklusif ini menyebabkan munculnya resistensi dari kelompok non-Muslim. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan pendekatan sosiolinguistik kritis, studi ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu telah kehilangan fungsi komunikatif yang inklusif. Sebaliknya, bahasa ini telah berkembang menjadi penanda simbolik yang menciptakan batas sosial dan membentuk identitas. Dengan merujuk pada teori ideologi bahasa (Irvine & Gal, 2000) dan modal linguistik (Bourdieu), penelitian ini menemukan bahwa pilihan bahasa di ruang publik Duri tidak lagi semata-mata bersifat pragmatis. Pilihan bahasa berfungsi sebagai cara untuk merepresentasikan dan mensimbolkan perlawanan terhadap dominasi budaya yang dirasakan. Studi ini merekomendasikan reorientasi ideologi bahasa serta implementasi kebijakan untuk merevitalisasi bahasa Melayu sebagai simbol budaya inklusif—yang mampu melampaui sekat-sekat agama dan etnis.

Kata Kunci: bahasa Melayu; pergeseran bahasa; ideologi bahasa; identitas

Pendahuluan

Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga penanda identitas, cerminan budaya, dan representasi ideologi (Suhandra, 2019). Dalam konteks masyarakat multietnis seperti

Indonesia, bahasa memainkan peran yang sangat strategis dalam membentuk kesadaran kolektif dan relasi sosial. Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas ini adalah pergeseran penggunaan bahasa Melayu di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Kota Duri merupakan kawasan industri dengan tingkat urbanisasi yang tinggi (Daulay, 2019). Dengan kedatangan berbagai kelompok etnis seperti Minang, Batak, Jawa, Bugis, dan lainnya, terjadi interaksi sosial yang intens yang turut memengaruhi dinamika bahasa lokal. Bahasa Melayu—yang sebelumnya menjadi simbol identitas dan budaya masyarakat lokal—mengalami pergeseran ke arah bahasa Minang dan bahasa Indonesia. Pergeseran ini tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi dan demografis, tetapi juga disebabkan oleh dorongan ideologis, terutama yang berkaitan dengan agama (Idris Aman, 2000).

Secara historis, Bahasa Melayu berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Bahasa ini tidak hanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga dalam teks-teks keagamaan seperti terjemahan Al-Qur'an, kitab fiqih, dan ceramah dakwah (Laengkang, 2017; Sania & Rusdi, 2022). Akibatnya, di beberapa komunitas non-Muslim, Bahasa Melayu mulai diasosiasikan secara kuat dengan identitas Islam. Dalam masyarakat yang multikultural seperti di Kota Duri, hal ini memunculkan resistensi—beberapa kelompok etnis non-Muslim memilih menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya sendiri demi menghindari pengidentifikasian religius yang tidak mereka anut.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *linguistic capital* atau modal linguistik yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu (Bourdieu & Passeron, 1990). Menurut Bourdieu, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga membawa nilai sosial yang ditentukan oleh konteks kekuasaan dan legitimasi yang melekat padanya (Bourdieu, 2018a, 2018b). Bahasa yang diasosiasikan dengan kelompok dominan dalam struktur sosial akan memiliki nilai sosial yang lebih tinggi dan dianggap lebih “berharga”. Dalam konteks masyarakat Melayu di Kota Duri, Bahasa Melayu memperoleh modal simbolik yang tinggi di kalangan Muslim karena keterkaitannya yang erat dengan ajaran agama, adat, dan sejarah Islam.

Namun, bagi kelompok non-Muslim, nilai tersebut justru dapat berubah menjadi beban identitas. Bahasa Melayu tidak lagi dipandang netral, melainkan dimaknai sebagai simbol dominasi ideologis yang merepresentasikan identitas kelompok mayoritas. Penggunaan bahasa ini dalam ruang publik dapat dianggap sebagai tekanan simbolik, bahkan sebagai bentuk “pengislaman” identitas secara tidak langsung. Dominasi simbolik semacam ini menciptakan ketimpangan dalam distribusi makna dan afiliasi sosial, di mana bahasa menjadi instrumen yang membatasi, bukan menjembatani, relasi antar kelompok.

Kajian tentang pergeseran bahasa dalam masyarakat multikultural tidak dapat dilepaskan dari pendekatan sosiolinguistik yang menempatkan bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai representasi identitas, simbol budaya, bahkan ekspresi ideologis (Haryo et al., 2016). Dalam konteks masyarakat Melayu di Kota Duri, pergeseran bahasa Melayu tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor migrasi atau urbanisasi, melainkan juga oleh konfigurasi kekuasaan simbolik dan ideologi keagamaan yang melekat pada bahasa tersebut. Oleh karena itu, kajian ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur sosiolinguistik Indonesia yang masih minim membahas secara mendalam bagaimana proses ideologisasi agama memengaruhi dinamika dan pergeseran bahasa lokal, khususnya dalam konteks komunitas urban yang multietnis dan multiagama. Dengan menyoroti Bahasa Melayu di Kota Duri sebagai studi kasus, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan teoretis

terhadap pemahaman tentang bagaimana identitas keagamaan dan relasi kekuasaan membentuk praktik kebahasaan di ruang sosial yang kompleks

Secara teoritis, sosiolinguistik memandang bahasa sebagai bagian dari praktik sosial yang selalu berada dalam relasi kuasa dan identitas. Holmes (2013) menyebut bahwa pilihan bahasa mencerminkan keanggotaan sosial seseorang, termasuk dalam hal etnisitas, agama, gender, dan kelas sosial. Ketika sebuah bahasa dipilih atau ditinggalkan, keputusan itu tidak selalu netral—ia membawa konsekuensi identitas dan relasi sosial. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Kota Duri, Bahasa Melayu bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi telah menjadi simbol identitas etnis sekaligus keagamaan. Bahasa ini, yang berkembang pesat seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara, tidak lagi dilihat sebagai bahasa umum, melainkan sebagai bahasa yang “mewakili” kelompok Muslim.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika kita memandangnya melalui teori pergeseran bahasa dari Joshua Fishman. Fishman (1967, 1968) menyatakan bahwa pergeseran bahasa (*language shift*) terjadi ketika suatu komunitas mulai meninggalkan bahasa ibunya dan beralih menggunakan bahasa yang lebih dominan dalam domain-domain sosial seperti keluarga, pendidikan, dan agama. Sebaliknya, *language maintenance* adalah upaya komunitas untuk tetap mempertahankan eksistensi bahasa mereka dengan menjaga fungsi bahasa dalam ranah-ranah vital tersebut. Dalam konteks Duri, Bahasa Melayu tampak mulai kehilangan fungsinya dalam ruang-ruang publik dan hanya bertahan dalam lingkaran-lingkaran terbatas komunitas Melayu sendiri. Bahkan, penggunaan Bahasa Melayu justru dihindari oleh beberapa kelompok non-Muslim yang merasa bahasa ini terlalu identik dengan simbol-simbol keislaman.

Di sinilah teori *identitas linguistik* dan *ideologi bahasa* menjadi relevan. Identitas linguistik adalah bagian dari identitas sosial yang terbentuk melalui afiliasi bahasa. Sebuah bahasa yang diasosiasikan dengan nilai atau keyakinan tertentu akan mengandung ideologi. Irvine dan Gal (2000) menyebutkan bahwa *linguistic ideology* adalah kepercayaan atau asumsi sosial terhadap sebuah bahasa, yang bisa mengangkat atau justru menyingkirkan bahasa tersebut dari ruang sosial tertentu. Dalam hal ini, resistensi terhadap Bahasa Melayu oleh komunitas non-Muslim di Duri dapat dipahami sebagai ekspresi ideologis—bukan karena bahasa itu tidak dimengerti, tetapi karena bahasa itu membawa simbol yang tidak mereka anggap sebagai bagian dari identitas mereka.

Akhirnya, bahasa juga menciptakan *batas sosial* (*social boundary*) yang memisahkan “kita” dan “mereka” dalam masyarakat multietnis (Kamla, 2023; Thomas, 2022; Tilly, 2004). Bahasa yang digunakan atau dihindari menjadi penanda keanggotaan kelompok, dan dalam konteks Kota Duri, Bahasa Melayu telah berubah fungsi dari alat pemersatu menjadi penanda eksklusivitas identitas. Pergeseran ke bahasa Minang atau Bahasa Indonesia menjadi semacam “jalan tengah” bagi kelompok etnis lain untuk tetap berkomunikasi tanpa merasa terjerat oleh simbol-simbol keagamaan tertentu.

Selain itu, Joshua Fishman (1967) dalam teorinya tentang pergeseran dan pemertahanan bahasa (*language shift and language maintenance*) menekankan bahwa bahasa minoritas rentan mengalami pergeseran jika tidak dipertahankan dalam domain-domain vital seperti keluarga, pendidikan, dan agama. Fishman menegaskan bahwa jika suatu bahasa kehilangan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari dan hanya terbatas pada ruang simbolik, maka proses kepunahan akan semakin cepat. Hal ini terlihat di Kota Duri, di mana Bahasa Melayu mulai tersisih dari ruang publik seperti sekolah, pasar, dan pemerintahan, dan hanya bertahan di komunitas-komunitas Melayu yang tertutup.

Situasi ini diperparah oleh lemahnya peran negara dalam melindungi bahasa daerah. Kebijakan linguistik nasional yang memberi dominasi lebih besar pada Bahasa Indonesia, serta kurangnya dukungan konkret terhadap revitalisasi bahasa lokal, semakin mempercepat proses pergeseran ini. Dalam ruang publik Kota Duri, budaya dan bahasa etnis pendatang bahkan lebih tampak dan hidup dibanding budaya Melayu itu sendiri.

Dengan demikian, studi mengenai pergeseran Bahasa Melayu di Kota Duri tidak semata-mata membahas persoalan linguistik, melainkan menelusuri dimensi yang lebih dalam terkait ideologi, relasi kuasa, dan konstruksi identitas. Bahasa dalam konteks ini menjadi “medan pertempuran simbolik” di mana kelompok-kelompok sosial menegosiasikan eksistensi, afiliasi, dan batas-batas kulturalnya. Melalui perspektif sosiolinguistik, khususnya konsep *linguistic capital* dari Bourdieu dan *language shift* dari Fishman, pergeseran bahasa dipahami sebagai cerminan dari dinamika sosial-politik yang kompleks—bukan sekadar akibat dari kebutuhan komunikasi yang netral.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses ideologisasi Bahasa Melayu berlangsung dalam masyarakat multietnis Kota Duri, serta bagaimana hal tersebut berdampak terhadap pola komunikasi antar kelompok etnis dan agama. Oleh karena itu, pelestarian Bahasa Melayu tidak cukup dilakukan melalui pendekatan kultural semata, melainkan memerlukan kebijakan publik yang adil, intervensi pendidikan yang sensitif terhadap pluralitas, serta penguatan peran komunitas sebagai agen pelestari bahasa yang inklusif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan latar sosiolinguistik (Achmad Dandy, 2021; Mahsun, 2012), guna memahami secara mendalam fenomena pergeseran bahasa Melayu di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada dinamika sosial, kultural, dan ideologis yang melatarbelakangi perubahan praktik kebahasaan masyarakat, bukan pada aspek kebahasaan yang bersifat struktural atau gramatikal semata.

Pengumpulan data dilakukan selama periode September hingga November 2024 melalui tahapan observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan kunci (Anggito & Johan Setiawan, 2018), serta dokumentasi berbagai artefak kebahasaan yang merepresentasikan dinamika penggunaan Bahasa Melayu dalam konteks sosial masyarakat Kota Duri. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk menangkap situasi kebahasaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Duri, khususnya dalam interaksi di ruang publik seperti pasar, sekolah, tempat ibadah, dan lingkungan pemerintahan. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial nyata, serta menangkap nuansa-nuansa simbolik dan ideologis yang melekat pada penggunaan bahasa tertentu.

Untuk memperkuat data observasi, dilakukan juga wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci yang dianggap memahami secara baik kondisi sosial-budaya dan kebahasaan setempat. Informan dipilih secara purposif, dengan mempertimbangkan latar belakang etnis, agama, usia, serta keterlibatan aktif mereka dalam masyarakat. Wawancara dilakukan terhadap 14 informan, yang terdiri atas 6 tokoh Melayu-Muslim, 4 warga Minang, 4 tokoh non-Muslim dari etnis Batak dan Tionghoa. Wawancara ini diarahkan untuk menggali pandangan mereka terhadap bahasa Melayu, alasan di balik pilihan bahasa yang digunakan, serta persepsi mereka terhadap relasi antara bahasa, agama, dan identitas. Selain itu, peneliti

juga mendokumentasikan sejumlah bentuk ekspresi budaya dan bahasa yang muncul dalam ruang publik, seperti baliho, spanduk, kegiatan seni, hingga bentuk-bentuk ritual keagamaan yang menggunakan bahasa tertentu. Dokumentasi ini menjadi pelengkap yang penting untuk membandingkan antara praktik nyata dengan persepsi masyarakat terhadap bahasa.

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis meliputi tiga tahap utama: reduksi data, yaitu penyaringan dan pemilahan data penting yang relevan dengan fokus penelitian; penyajian data, dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur; dan penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang sepanjang proses penelitian berlangsung. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan keabsahan temuan. Misalnya dengan mencocokkan pengamatan di pasar dengan wawancara pedagang, serta dokumentasi baliho bahasa untuk mengonfirmasi persepsi identitas linguistik.

Secara geografis dan sosiologis, pemilihan Kota Duri sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Kota Duri merupakan sebuah kota kecil yang terletak di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dengan luas wilayah sekitar 930 kilometer persegi—kurang lebih setengah dari luas Kota Dumai—Duri berada pada jarak sekitar 130 kilometer dari Pekanbaru, ibu kota provinsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkalis tahun 2024, jumlah penduduk Kota Duri mencapai 349.389 jiwa. Komposisi keagamaan penduduk Duri menunjukkan keragaman yang signifikan, meskipun mayoritas beragama Islam, yaitu sebesar 81,24%. Penduduk yang menganut Kristen Protestan tercatat sebanyak 16,31%, sedangkan Katolik berjumlah 1,40%. Adapun pemeluk agama Buddha mencapai 1,01%, Hindu 0,02%, dan penganut Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebesar 0,02%. Menariknya, jumlah pemeluk Kepercayaan sedikit lebih tinggi dibandingkan pemeluk agama Hindu, dan hampir sebanding dengan pemeluk Buddha, mencerminkan pluralitas keagamaan yang khas dalam konteks masyarakat urban di wilayah ini. Di satu sisi, Kota Duri merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis yang memiliki akar budaya Melayu yang kuat; namun di sisi lain, dominasi etnis pendatang seperti Minang, Batak, dan Jawa telah menciptakan kompleksitas sosial yang luar biasa, termasuk dalam praktik kebahasaan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya tidak hanya menjelaskan gejala pergeseran bahasa secara deskriptif, tetapi juga menafsirkan makna-makna sosial dan simbolik di balik praktik tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik terhadap kajian sosiolinguistik dan kebijakan kebahasaan, sekaligus menjadi refleksi kritis atas dinamika pluralisme dan relasi kuasa dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, ditemukan bahwa dominasi bahasa Melayu di Kota Duri kini mengalami pergeseran. Bahasa ini cenderung terbatas pada komunitas-komunitas etnik Melayu yang bersifat tertutup dan eksklusif, seperti dalam kegiatan keagamaan di surau-surau atau rumah ibadah lokal lainnya, pengajian ibu-ibu, serta forum adat dan budaya tertentu. Dalam konteks komunitas ini, bahasa Melayu tetap berfungsi sebagai penanda identitas kultural dan historis, sekaligus menjadi simbol perlawanan terhadap arus homogenisasi budaya dari luar. Seorang tokoh adat Melayu yang diwawancarai menyebutkan bahwa *“bahasa ini adalah warisan leluhur, kalau kami tinggalkan, hilanglah kami sebagai orang Melayu.”* (Wawancara bersama Alkhudri, bukan

nama sebenarnya, 20 Oktober 2024). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bahasa Melayu diinternalisasi sebagai bagian integral dari eksistensi etnis dan spiritual.

Namun demikian, di ruang-ruang publik yang bersifat inklusif dan heterogen—seperti pasar, sekolah, terminal, hingga kantor-kantor pelayanan publik—posisi Bahasa Melayu semakin terpinggirkan. Dalam observasi di salah satu sekolah negeri, guru-guru dan siswa dari latar belakang etnis berbeda lebih memilih menggunakan Bahasa Indonesia sebagai lingua franca, dengan sesekali bercampur bahasa Minang dalam percakapan informal. Hal serupa terlihat di pasar Mandau, di mana interaksi antar pedagang dan pembeli lebih dominan dalam Bahasa Indonesia atau Minang, sementara Bahasa Melayu nyaris tidak terdengar, kecuali di antara pedagang yang secara eksplisit mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu.

Pergeseran ini mencerminkan terjadinya transformasi dalam otoritas simbolik bahasa di tatanan sosial Kota Duri. Bahasa Melayu yang dahulu memiliki legitimasi luas sebagai bahasa pergaulan dan simbol kultural kini kehilangan posisi tersebut dalam arena sosial yang lebih luas. Bahasa Indonesia muncul sebagai bahasa netral yang diterima lintas etnis dan agama, sementara penguatan Bahasa Minang berkorelasi dengan meningkatnya dominasi etnis Minangkabau dalam sektor perdagangan, pendidikan swasta, dan organisasi sosial. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa tidak hanya mencerminkan preferensi komunikatif, tetapi juga menandakan pergeseran kuasa simbolik dalam ruang sosial multikultural Kota Duri.

Meskipun banyak nama gedung dan ruang publik di Kota Duri menggunakan nama-nama khas Melayu—seperti *Gedung Laksamana Raja di Laut*, *Balai Adat Melayu Mandau*, atau *Ruang Datuk Empat Suku*—namun pola kebahasaan yang ditemukan dalam papan-papan informasi justru menunjukkan dominasi penuh Bahasa Indonesia. Pengumuman resmi, penunjuk arah, hingga informasi layanan publik seluruhnya ditulis dalam Bahasa Indonesia tanpa disertai padanan dalam Bahasa Melayu. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks simbolik: secara nominal dan ornamen budaya, identitas Melayu tetap ditampilkan, namun dalam praktik komunikasi sehari-hari, Bahasa Melayu mengalami peminggiran bahkan dalam ruang yang seharusnya menjadi wilayah simboliknya sendiri. Ketidakhadiran Bahasa Melayu dalam representasi visual di ruang publik menjadi penanda konkret penyusutan legitimasi simbolik bahasa tersebut di tengah masyarakat yang semakin plural dan terstandarisasi secara linguistik oleh negara.

Fenomena pergeseran Bahasa Melayu di Kota Duri secara jelas menunjukkan bahwa bahasa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai alat komunikasi teknis, melainkan sebagai arena simbolik di mana identitas sosial, afiliasi keagamaan, dan relasi kekuasaan berinteraksi dan saling memengaruhi (Suhendra, 2019). Dalam masyarakat multietnis seperti Kota Duri, bahasa menjadi bagian dari infrastruktur sosial yang mencerminkan dinamika dominasi dan subordinasi antar kelompok. Kondisi ini sejalan dengan gagasan Michel Foucault (Ball, 2012; Foucault, 2021) mengenai bagaimana bahasa menjadi instrumen produksi dan reproduksi kekuasaan simbolik dalam masyarakat. Bahasa yang digunakan di ruang publik bukanlah pilihan bebas, melainkan hasil dari konfigurasi kekuasaan yang menentukan bahasa mana yang dianggap sah, dominan, atau marginal. Dalam konteks ini, Bahasa Melayu telah mengalami marginalisasi simbolik, bukan karena kehilangan fungsionalitas linguistiknya, tetapi karena bergesernya otoritas budaya yang dahulu melekat pada komunitas Melayu sebagai kelompok dominan lokal.

Dengan demikian, pergeseran Bahasa Melayu di Kota Duri tidak sekadar mencerminkan perubahan linguistik, tetapi menjadi indikator perubahan sosial dan politik identitas. Pergeseran ini menandai bagaimana bahasa beroperasi dalam logika masyarakat majemuk,

di mana makna, nilai, dan kekuasaan melekat pada pilihan-pilihan linguistik yang dipraktikkan setiap hari. Dalam kerangka ini, studi bahasa tidak bisa dilepaskan dari analisis sosial yang lebih luas, termasuk isu integrasi, dominasi etnis, dan pluralisme yang belum sepenuhnya setara dalam ranah publik.

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pergeseran Bahasa Melayu di Kota Duri adalah tingginya arus migrasi ke wilayah ini, terutama dari kelompok etnis Minangkabau, Batak, dan Jawa. Sebagai salah satu pusat industri minyak di Provinsi Riau, Kota Duri menjadi magnet ekonomi yang menarik pendatang dari berbagai daerah dengan motivasi mobilitas sosial dan ekonomi (Amin & Suyanto, 2017; Sahril, 2018; Sitanggung, 2018). Para pendatang ini tidak hanya membawa tenaga kerja, tetapi juga membawa serta modal kultural, berupa bahasa, tradisi, serta praktik keagamaan masing-masing. Dalam jangka panjang, kehadiran yang massif, sistematis, dan berlangsung terus-menerus ini telah mengubah lanskap sosial-linguistik Kota Duri secara signifikan.

Dampak dari migrasi ini terlihat paling jelas dalam pergeseran penggunaan bahasa di ruang-ruang sosial yang vital. Bahasa Melayu, yang dahulu memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat lokal, kini mulai kehilangan fungsinya dalam ranah-ranah seperti pasar, dunia usaha, dan institusi pendidikan. Dalam konteks inilah, teori Joshua Fishman tentang *language shift* menjadi relevan (Wagiati, 2018). Fishman menyatakan bahwa pergeseran bahasa terjadi secara progresif ketika bahasa lokal mulai kehilangan dominasinya dalam domain-domain penting kehidupan sosial, terutama keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi. Ketika kelompok pendatang mulai menguasai struktur ekonomi dan pendidikan lokal, maka bahasa mereka pun perlahan-lahan menggantikan posisi bahasa lokal sebagai alat komunikasi dominan yang lebih "berfungsi" secara sosial.

Lebih dari itu, keberfungsian sosial bahasa pendatang tidak hanya terletak pada jumlah penuturnya, tetapi juga pada asosiasi simbolik yang melekat padanya. Bahasa Minang, misalnya, tidak hanya digunakan dalam interaksi sehari-hari di pasar, tetapi juga membawa serta simbol-simbol kekuatan ekonomi, mobilitas sosial, bahkan religiositas yang khas. Di sisi lain, Bahasa Melayu mulai terpinggirkan karena dianggap kurang relevan dalam konteks ekonomi modern dan tidak lagi menjadi simbol dominan di ruang publik. Akibatnya, proses *language shift* tidak terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil dari konfigurasi sosial dan ekonomi yang secara struktural menguntungkan bahasa pendatang.

Dengan demikian, migrasi bukan hanya membawa perubahan demografis, tetapi juga menciptakan pergeseran hegemoni simbolik dalam ruang kebahasaan. Proses ini menjadi tantangan serius bagi pemertahanan Bahasa Melayu, yang kini tidak hanya bersaing dengan bahasa nasional, tetapi juga dengan bahasa-bahasa etnik lain yang telah mendapatkan tempat strategis dalam tatanan sosial Kota Duri.

Namun demikian, faktor yang paling krusial dalam mempercepat pergeseran Bahasa Melayu di Kota Duri bukan hanya arus migrasi atau dominasi ekonomi, melainkan justru terletak pada identifikasi ideologis terhadap Bahasa Melayu itu sendiri. Dalam konstruksi sosial masyarakat multietnis Kota Duri, Bahasa Melayu tidak lagi dipersepsi semata-mata sebagai bahasa etnik, melainkan telah mengalami transformasi simbolik menjadi "bahasa Islam"—yakni bahasa yang dianggap merepresentasikan nilai-nilai, ajaran, serta simbol religius tertentu yang secara eksklusif dikaitkan dengan identitas Muslim.

Proses ideologisasi bahasa telah menjadikan Bahasa Melayu tidak lagi netral secara sosial, melainkan diposisikan sebagai bahasa yang sarat dengan muatan identitas keagamaan tertentu—khususnya Islam. Dalam konteks masyarakat multietnis dan multiagama di Kota

Duri, Bahasa Melayu tidak hanya dipersepsikan sebagai bahasa etnis, tetapi juga sebagai representasi simbolik dari kelompok mayoritas Muslim-Melayu. Hal ini berdampak langsung terhadap sikap kebahasaan komunitas non-Muslim yang merasa teralienasi dari bahasa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan non-Muslim, ditemukan bahwa sebagian dari mereka secara sadar menghindari penggunaan Bahasa Melayu di ruang-ruang publik. Pilihan ini tidak dilatarbelakangi oleh keterbatasan linguistik, melainkan merupakan strategi identitas yang dimaksudkan untuk menjaga jarak dari simbol-simbol keagamaan yang dianggap tidak merepresentasikan keberadaan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Seorang pedagang non-Muslim di Pasar Mandau, misalnya, menyatakan, "*Kalau pakai Bahasa Melayu di pasar, saya sering dikira Muslim, jadi saya pilih pakai Bahasa Indonesia saja. Biar netral.*" (Wawancara bersama Rossi, bukan nama sebenarnya, 20 Oktober 2024). Pernyataan ini menegaskan bahwa pilihan bahasa di Kota Duri tidak lagi semata-mata bersifat komunikatif, melainkan juga bersifat representatif dan simbolik.

Lebih jauh, seorang informan beretnis Tionghoa yang aktif dalam komunitas Kristen lokal menyampaikan bahwa menggunakan Bahasa Melayu dalam forum sosial tertentu "*terasa seperti menampilkan identitas yang bukan miliknya.*"

"Saya bisa Bahasa Melayu, karena dari kecil sudah biasa dengar dan kadang dipakai juga di lingkungan. Tapi jujur aja, kalau lagi di acara umum atau kumpul lintas komunitas, saya lebih pilih pakai Bahasa Indonesia. Soalnya, kalau saya pakai Bahasa Melayu, orang langsung mikir saya ini Melayu atau Muslim. Padahal saya Tionghoa dan Kristen. Rasanya seperti pakai identitas yang bukan saya." (Wawancara bersama Rossi, bukan nama sebenarnya, 20 Oktober 2024)

Ungkapan ini mencerminkan adanya tensi identitas yang melekat dalam praktik kebahasaan sehari-hari. Dalam konteks ini, Bahasa Melayu tidak hanya mengalami penyempitan ruang fungsi, tetapi juga mengalami delegitimasi simbolik di mata kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan secara identitas. Dengan demikian, ideologisasi Bahasa Melayu tidak hanya memengaruhi dinamika interaksi lintas komunitas, tetapi juga mendorong terbentuknya batas simbolik yang semakin tegas antara kelompok mayoritas dan minoritas. Bahasa tidak lagi sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi medan negosiasi identitas dan kekuasaan dalam struktur sosial Kota Duri yang kompleks.

Kecenderungan ini memperkuat posisi Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dianggap netral secara agama, sekaligus "aman" secara sosial (Astuti, 2019). Bahasa Indonesia dalam konteks ini bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi nasional, tetapi juga menjadi sarana negosiasi identitas dalam masyarakat majemuk, terutama bagi kelompok yang merasa terpinggirkan oleh simbolisme keagamaan yang melekat pada bahasa lokal tertentu (Abd. Rahman Rahim et al., 2023). Pilihan terhadap Bahasa Indonesia menjadi semacam strategi adaptif, untuk menghindari kemungkinan eksklusi sosial dan menjaga harmoni dalam interaksi lintas komunitas (Wijana, 2018).

Fenomena ini mencerminkan bagaimana bahasa dapat berfungsi sebagai alat diferensiasi simbolik, sebagaimana diteorikan dalam pendekatan sosiolinguistik kritis. Ketika sebuah bahasa diasosiasikan dengan kelompok identitas tertentu—terutama agama—ia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga penanda batas sosial (*social boundary marker*) yang secara tidak langsung memisahkan "yang termasuk" dan "yang dikecualikan". Bahasa Melayu, dalam hal ini, telah menjadi simbol representasi kelompok mayoritas Muslim di Kota Duri,

yang oleh sebagian non-Muslim dirasakan sebagai bentuk hegemoni kultural dan ideologis yang membatasi inklusivitas (Peter & Simatupang, 2022).

Situasi pergeseran Bahasa Melayu di Kota Duri secara jelas memperkuat argumen Pierre Bourdieu mengenai konsep modal linguistik (*linguistic capital*), di mana bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk modal simbolik yang memiliki nilai dan kekuasaan dalam struktur sosial tertentu. Dalam konteks ini, Bahasa Melayu memiliki nilai simbolik tinggi di mata kelompok mayoritas Muslim karena ia mengandung muatan religius, historis, dan kultural yang memperkuat identitas mereka. Namun, nilai yang sama justru berubah menjadi tekanan simbolik bagi kelompok non-Muslim, yang tidak merasa menjadi bagian dari identitas yang diwakili oleh bahasa tersebut.

Menurut Bourdieu (Allan, 2022), bahasa bukan hanya alat komunikasi netral, melainkan arena pertarungan simbolik, di mana pilihan bahasa mencerminkan dan sekaligus mereproduksi struktur dominasi sosial. Dalam masyarakat multietnis seperti Kota Duri, penggunaan bahasa tertentu tidak lagi bersifat pragmatis, melainkan merupakan strategi representasi identitas, baik untuk menyatakan keterlibatan maupun untuk menyatakan jarak. Bahasa Melayu, dalam hal ini, menjadi simbol kuasa kultural kelompok dominan, dan penggunaannya secara tidak langsung mengafirmasi afiliasi terhadap sistem nilai yang melekat pada bahasa itu—terutama nilai-nilai keislaman.

Oleh karena itu, penolakan atau penerimaan terhadap Bahasa Melayu tidak bisa dipahami sebagai sekadar pilihan linguistik yang netral, tetapi sebagai tindakan sosial yang disengaja, yang sarat dengan makna identitas (Bourdieu, 1993). Setiap individu atau kelompok yang memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan Bahasa Melayu sebenarnya sedang bernegosiasi posisi sosialnya dalam struktur masyarakat. Bahasa, dalam pengertian ini, menjadi instrumen untuk menegaskan “siapa kita” dan “siapa mereka”, serta siapa yang memiliki otoritas untuk berbicara dalam bahasa siapa.

Dengan demikian, dinamika kebahasaan di Kota Duri menunjukkan bahwa bahasa telah menjadi ajang produksi dan reproduksi relasi kuasa, di mana modal linguistik tidak tersebar secara merata, dan justru menciptakan asimetri sosial antara kelompok yang memiliki otoritas simbolik atas bahasa tertentu dan kelompok yang memilih menjauh darinya demi menjaga batas identitasnya sendiri (Bredo & Feinberg, 1979). Situasi ini menggambarkan bagaimana bahasa dapat memperkuat sekaligus meretakkan kohesi sosial dalam masyarakat plural jika tidak dikelola secara inklusif.

Fenomena pergeseran bahasa di Kota Duri juga mengungkapkan semakin mengerasnya batas-batas sosial (*social boundaries*) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat multietnis (Chong, 1998). Dalam konteks ini, bahasa berfungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat klasifikasi sosial yang secara simbolik membedakan antara kelompok “kami” dan “mereka”. Bahasa Melayu, misalnya, tidak lagi hanya dipahami sebagai milik etnis Melayu, tetapi telah mengalami perluasan makna sebagai simbol “Melayu-Muslim”. Sebaliknya, penggunaan Bahasa Indonesia atau bahasa etnik lain seperti Minang, Batak, atau Jawa, dipersepsikan sebagai simbol identitas “non-Melayu” atau bahkan “non-Muslim”.

Dalam masyarakat yang ditandai oleh keragaman identitas, pilihan bahasa menjadi tindakan sosial yang sarat makna, bukan semata-mata keputusan pragmatis. Penggunaan atau penghindaran terhadap bahasa tertentu merupakan bagian dari strategi representasi identitas, yang sering kali dilakukan secara sadar untuk mempertegas kedekatan atau menjaga jarak simbolik dari kelompok identitas tertentu. Bahasa Melayu dalam hal ini, karena asosiasinya yang kuat dengan Islam, digunakan oleh sebagian untuk menegaskan posisi

identitas keagamaan dan kultural mereka; sementara yang lain memilih bahasa alternatif untuk menghindari pengafirmasian identitas ideologis yang tidak mereka klaim.

Teori *boundary-making* dalam kajian sosiologi dan antropologi memperjelas bagaimana bahasa dapat digunakan sebagai alat pembentukan dan penegasan batas antar kelompok sosial. Menurut Hoffman et al., (1993) dan Lamont, (2014), batas sosial terbentuk ketika perbedaan dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga menciptakan klasifikasi yang memisahkan “kita” dari “mereka” berdasarkan kategori seperti etnis, agama, atau bahasa. Dalam konteks Duri, bahasa bukan lagi jembatan komunikasi yang netral, tetapi telah menjadi marker simbolik dari afiliasi identitas yang membentuk logika eksklusi dan inklusi dalam ruang sosial.

Dengan demikian, setiap pilihan bahasa di ruang publik tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terikat pada konteks relasi kekuasaan dan identifikasi kolektif yang lebih besar (Suharyo et al., 2014). Bahasa Indonesia, meskipun secara formal adalah bahasa nasional yang netral, dalam praktiknya digunakan oleh sebagian kelompok sebagai strategi sosial untuk menghindari politisasi identitas, sedangkan Bahasa Melayu dipilih oleh kelompok lain sebagai bentuk afirmasi terhadap warisan budaya dan agama mereka. Ketegangan ini menunjukkan bahwa bahasa adalah medan yang terus-menerus dinegosiasikan dan dipertarungkan dalam dinamika masyarakat yang plural dan berlapis-lapis secara identitas (Nasution, 2007).

Menariknya, fenomena pergeseran Bahasa Melayu di Kota Duri tidak hanya datang dari luar komunitas, tetapi juga dari dalam kelompok Melayu itu sendiri. Terjadi semacam ambivalensi identitas linguistik di kalangan penutur asli: di satu sisi, mereka secara eksplisit menunjukkan sikap positif terhadap bahasa dan budaya Melayu—menyatakan kebanggaan akan warisan leluhur mereka; namun di sisi lain, dalam praktik sehari-hari, tidak sedikit dari mereka yang lebih memilih menggunakan Bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Minang, terutama dalam konteks interaksi publik. Gejala ini mengindikasikan terjadinya internal *language shift*, yakni pergeseran yang dilakukan oleh komunitas inti penutur terhadap bahasanya sendiri, karena bahasa tersebut dianggap semakin kehilangan fungsi simbolik dan utilitas sosial dalam kehidupan modern.

Fenomena ini memperkuat pandangan Fishman (1991) bahwa keberlangsungan bahasa tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar bahasa itu dipertahankan oleh komunitas luar, tetapi terutama oleh komitmen internal dari komunitas penuturnya sendiri, terutama dalam ranah-ranah kunci seperti keluarga, pendidikan, agama, dan interaksi sosial sehari-hari. Ketika komunitas asli tidak lagi menggunakan bahasa warisannya dalam konteks-konteks vital ini, maka bahasa tersebut akan mengalami degradasi fungsional dan simbolik, yang pada akhirnya berujung pada kemunduran, bahkan kepunahan.

Lebih jauh, kegagalan negara dan pemerintah daerah dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan perlindungan bahasa daerah turut mempercepat proses pergeseran ini. Bahasa Melayu tidak memperoleh tempat yang layak dalam sistem pendidikan formal—baik sebagai bahasa pengantar maupun sebagai materi muatan lokal. Di sisi lain, media lokal juga cenderung mengabaikan penggunaan Bahasa Melayu, lebih memilih format bahasa Indonesia atau bahkan bahasa etnis dominan lain yang dianggap lebih komersial. Tak hanya itu, minimnya kegiatan kebudayaan yang secara eksplisit mengangkat dan merayakan bahasa Melayu menjadikan bahasa ini semakin kehilangan ruang simboliknya dalam kehidupan publik.

Dalam kerangka ini, kita dapat melihat bahwa pergeseran Bahasa Melayu di Kota Duri merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tekanan eksternal dan kegagalan internal,

baik dari sisi komunitas maupun dari kebijakan negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Fishman, ketika sebuah bahasa kehilangan posisi dalam ranah-ranah vital dan tidak lagi didukung oleh kebijakan yang memadai, maka bahkan komunitas penuturnya sendiri dapat menjadi agen pergeseran. Bahasa warisan, dalam situasi seperti ini, tidak hanya ditinggalkan oleh “yang lain”, tetapi juga oleh “yang empunya”.

Dalam konteks dinamika kebahasaan di Kota Duri, Bahasa Melayu kini menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. *Pertama*, tekanan eksternal berupa dominasi bahasa-bahasa lain—terutama Bahasa Indonesia dan bahasa Minang—yang lebih unggul dari segi jumlah penutur maupun fungsi komunikatif dalam ruang-ruang sosial vital. *Kedua*, tekanan internal, yang muncul dari dua sisi sekaligus: yakni resistensi ideologis dari kelompok non-Muslim yang merasa teralienasi oleh simbolisme keagamaan dalam Bahasa Melayu, dan minimnya revitalisasi dari dalam komunitas Melayu itu sendiri, yang cenderung lebih memilih bahasa lain dalam interaksi sehari-hari. Kombinasi tekanan ini mempercepat proses pergeseran dan menempatkan Bahasa Melayu dalam posisi yang semakin terpinggirkan secara simbolik maupun praktis.

Ironisnya, bahasa yang dulunya menjadi simbol peradaban Melayu dan instrumen utama penyebaran nilai-nilai Islam di Nusantara (Manaf & Abu, 2011), kini justru mengalami *penolakan kultural* karena terlalu kuat diasosiasikan dengan satu identitas keagamaan. Bahasa yang dahulu bersifat inklusif dan menjadi pengikat antarwilayah kini dibebani oleh konstruksi identitas yang sempit dan eksklusif. Situasi ini menimbulkan pertanyaan reflektif yang sangat mendasar: masih mungkinkah Bahasa Melayu dikembalikan fungsinya sebagai bahasa budaya bersama yang melampaui batas-batas agama dan etnis? Ataukah ia akan terus mengalami marginalisasi seiring menguatnya politik identitas berbasis agama, etnis, dan budaya?

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya serius dalam bentuk reorientasi ideologi kebahasaan. Bahasa Melayu perlu direposisi kembali sebagai simbol kebudayaan kolektif, bukan hanya sebagai penanda identitas keagamaan tertentu. Ini menuntut pembacaan ulang terhadap sejarah dan fungsi sosial Bahasa Melayu yang lebih luas dari sekadar narasi Islamisasi, serta mengedepankan nilai-nilai multikultural, toleran, dan terbuka yang juga melekat dalam tradisi Melayu itu sendiri.

Reorientasi ini harus ditopang oleh kebijakan publik yang mendukung multilingualisme, bukan dengan menempatkan bahasa lokal sebagai pelengkap simbolik semata, tetapi dengan menjadikannya bagian dari sistem pendidikan, media lokal, dan aktivitas budaya yang hidup. Di saat yang sama, revitalisasi bahasa harus dilakukan melalui pelibatan aktif komunitas—terutama generasi muda—dalam menciptakan ruang-ruang penggunaan bahasa yang relevan, kontekstual, dan bermakna. Bahasa Melayu hanya akan bertahan jika ia tidak diperlakukan sebagai artefak warisan, melainkan sebagai alat ekspresi budaya yang dinamis, yang mampu berdialog dengan zaman dan tetap inklusif bagi semua identitas.

Diskusi

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah munculnya resistensi linguistik dari kelompok non-Muslim terhadap penggunaan Bahasa Melayu dalam ruang-ruang publik. Resistensi ini tidak disebabkan oleh ketidakmampuan secara linguistik—karena sebagian besar dari mereka juga mampu memahami atau menggunakan Bahasa Melayu—melainkan merupakan bentuk penolakan simbolik terhadap makna ideologis yang melekat pada bahasa tersebut. Bahasa, dalam konteks ini, tidak lagi diposisikan sebagai sekadar alat komunikasi

netral, tetapi telah berubah menjadi representasi identitas keagamaan yang eksklusif. Bahasa Melayu, yang secara historis berkembang bersama proses islamisasi di wilayah Melayu, kini dipersepsikan oleh sebagian masyarakat non-Muslim sebagai bahasa yang sarat dengan nilai-nilai religius Islam (Hidayat, 2008).

Hal ini terlihat jelas dari pernyataan salah satu informan beretnis Batak dan beragama Kristen, yang menyatakan bahwa penggunaan Bahasa Melayu di ruang sosial tertentu membuatnya merasa “*seolah bukan bagian dari komunitas*”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya menciptakan akses komunikasi, tetapi juga membentuk batas inklusi dan eksklusi sosial. Ketika bahasa tertentu mulai diasosiasikan secara kuat dengan identitas keagamaan, maka ia dapat kehilangan sifat inklusifnya dan berubah menjadi instrumen simbolik yang memproduksi batas identitas sosial. Dalam konteks ini, Bahasa Melayu tidak lagi dipahami sebagai milik bersama, melainkan sebagai bahasa milik komunitas tertentu—yakni komunitas Muslim—yang menguasai ruang sosial dan kultural.

Fenomena ini dapat dibaca melalui lensa teori *linguistic ideology*, di mana persepsi masyarakat terhadap bahasa dipengaruhi oleh relasi kuasa dan makna-makna sosial yang dilekatkan padanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Irvine dan Gal (2000), ideologi linguistik membentuk bagaimana suatu kelompok memaknai bahasa, termasuk siapa yang berhak atau “layak” menggunakan bahasa tersebut dalam konteks tertentu. Dalam kasus ini, Bahasa Melayu telah mengalami proses ideologisasi, di mana bahasa yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi justru menjadi simbol hegemoni identitas keagamaan. Akibatnya, kelompok non-Muslim memilih untuk menjaga jarak simbolik dengan bahasa tersebut, sebagai bagian dari usaha mempertahankan identitas budaya dan agama mereka sendiri.

Dengan demikian, resistensi terhadap Bahasa Melayu bukanlah persoalan linguistik dalam arti sempit, tetapi merupakan manifestasi dari ketegangan identitas dalam masyarakat multikultural. Ketika sebuah bahasa kehilangan fungsinya sebagai medium netral dan mulai dibebani oleh simbol-simbol eksklusif, maka potensi konflik simbolik meningkat, dan ruang publik menjadi medan kontestasi antaridentitas. Ini menunjukkan bahwa bahasa tidak pernah benar-benar netral, melainkan senantiasa sarat dengan dimensi ideologis dan politis yang perlu dibaca secara kritis dalam analisis sosiolinguistik (Febrianto et al., 2022).

Dari perspektif teori ideologi bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Irvine dan Gal (2000), resistensi terhadap Bahasa Melayu di Kota Duri mencerminkan bagaimana bahasa dapat berfungsi sebagai simbol hegemonik yang, secara tidak langsung, menekan dan mengarahkan identitas kelompok lain. Dalam kerangka ini, bahasa tidak dipandang sebagai alat netral komunikasi, melainkan sebagai representasi ideologis yang membawa serta narasi kekuasaan, afiliasi budaya, dan sistem nilai yang melekat padanya. Bahasa menjadi entitas yang “berbicara” bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam struktur relasi sosial dan kekuasaan yang dibawanya.

Dalam konteks Kota Duri, penolakan terhadap Bahasa Melayu oleh kelompok non-Muslim dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap hegemoni identitas yang terkandung dalam bahasa tersebut. Bagi sebagian kelompok, Bahasa Melayu bukan hanya dilihat sebagai bahasa etnik, melainkan sebagai instrumen representasi identitas keagamaan Islam yang dominan. Oleh karena itu, menolak menggunakan Bahasa Melayu bukan semata soal selera linguistik atau kenyamanan berbahasa, tetapi merupakan strategi afirmatif dalam membangun batas identitas—yakni upaya untuk mengatakan, “kami bukan bagian dari itu”.

Penolakan ini merefleksikan apa yang disebut Irvine & Gal (2000) sebagai proses ikonisasi, yakni ketika ciri-ciri linguistik tertentu dipandang sebagai cerminan langsung dari identitas

kelompok sosial tertentu. Dalam kasus ini, Bahasa Melayu tidak hanya diideologisasikan sebagai milik kelompok Melayu-Muslim, tetapi juga menjadi bagian dari sistem tanda yang menciptakan “othering” terhadap kelompok non-Muslim. Dengan demikian, penggunaan atau penghindaran bahasa bukan lagi sekadar soal kemampuan atau kebiasaan, melainkan bagian dari politik representasi, di mana bahasa berperan aktif dalam menentukan siapa yang “di dalam” dan siapa yang “di luar” dari suatu komunitas simbolik.

Realitas ini memperlihatkan bahwa bahasa dapat menjadi alat dominasi kultural, bahkan ketika tidak digunakan secara eksplisit sebagai instrumen penindasan. Bahasa bisa berfungsi sebagai mekanisme eksklusi yang halus namun efektif, terutama ketika ideologi yang melekat padanya tidak memberikan ruang bagi keragaman identitas untuk hidup berdampingan. Oleh karena itu, dalam masyarakat multikultural seperti Kota Duri, persoalan bahasa sejatinya adalah persoalan kekuasaan: siapa yang menentukan makna bahasa, dan siapa yang merasa terpinggirkan olehnya.

Ironisnya, di tengah meningkatnya ancaman pergeseran bahasa, komunitas Melayu sebagai penutur asli justru tidak menunjukkan konsistensi dalam menjaga eksistensi Bahasa Melayu. Meskipun secara deklaratif banyak di antara mereka menyatakan kebanggaan atas identitas Melayu—dengan menyebut diri sebagai pewaris budaya dan tradisi lokal—namun dalam praktik sehari-hari, bahasa tersebut tidak lagi menjadi pilihan utama dalam interaksi publik. Bahasa Indonesia dan bahkan Bahasa Minang lebih sering digunakan dalam berbagai ruang sosial seperti pemerintahan, pendidikan, pasar, dan media lokal.

Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara sikap dan perilaku linguistik, yang dalam kajian sosiolinguistik disebut sebagai *attitude-behavior gap* (Rahardi, 2001). Di satu sisi, Bahasa Melayu masih diposisikan sebagai simbol identitas budaya yang luhur; namun di sisi lain, bahasa ini tidak lagi mendapatkan dukungan praktis karena dianggap kurang relevan secara fungsional dalam konteks sosial-ekonomi saat ini. Kondisi ini diperburuk oleh tidak adanya kebijakan bahasa yang menempatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kerja atau pengantar formal dalam institusi-institusi lokal, sehingga penggunaannya semakin terbatas dan bersifat seremonial semata.

Ketidakkonsistenan ini juga dapat dibaca sebagai bentuk internalisasi subordinasi simbolik, di mana komunitas Melayu secara tidak sadar telah mengadopsi logika dominan yang menempatkan bahasa mereka sebagai “kurang berguna” dibandingkan bahasa-bahasa lain yang lebih kuat secara sosial dan ekonomi. Akibatnya, Bahasa Melayu tidak hanya terpinggirkan oleh kelompok luar, tetapi juga terdegradasi dari dalam, karena kehilangan peran sentralnya dalam membentuk praktik komunikasi komunitas itu sendiri.

Situasi ini menunjukkan bahwa pemertahanan bahasa tidak cukup hanya dengan deklarasi identitas atau kebanggaan kultural. Tanpa adanya komitmen penggunaan yang konkret dan berkelanjutan, bahasa warisan akan tetap rentan mengalami kemunduran, bahkan di tengah klaim-klaim simbolik yang tampaknya kuat. Dalam kasus ini, Bahasa Melayu berisiko menjadi bahasa yang hanya hidup dalam upacara, pidato, dan museum—tetapi tidak lagi hadir dalam denyut kehidupan sosial masyarakat yang mengaku memilikinya.

Gejala pergeseran bahasa yang terjadi dalam komunitas Melayu di Kota Duri dapat dibaca sebagai bentuk *internalized language shift*—yaitu proses ketika penutur asli secara sadar atau tidak sadar mulai mengadopsi bahasa dominan, bukan karena tekanan eksternal yang eksplisit, tetapi karena terjadi perubahan persepsi nilai terhadap bahasa mereka sendiri (Sumarsono, 2017). Dalam kasus ini, Bahasa Melayu tidak lagi diposisikan sebagai bahasa yang bergengsi atau memiliki daya guna tinggi dalam kehidupan sosial kontemporer. Sebaliknya,

bahasa ini mulai dipandang sebagai sesuatu yang kuno, kurang fungsional, dan tidak mampu mengakomodasi kebutuhan komunikasi dalam ranah publik yang dinamis dan kompetitif.

Dari sudut pandang Pierre Bourdieu (2018), fenomena ini mencerminkan pergeseran dalam struktur *linguistic capital*—di mana nilai simbolik dan sosial dari suatu bahasa ditentukan oleh konteks kekuasaan dan legitimasi sosial yang melekat padanya. Ketika komunitas Melayu secara tidak sadar menganggap Bahasa Melayu memiliki nilai sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan Bahasa Indonesia atau bahasa lain yang dominan (seperti Minang), maka proses pergeseran bahasa menjadi semakin sulit dicegah. Bahasa Indonesia dilihat sebagai bahasa resmi, nasional, dan sarana mobilitas sosial vertikal; sementara Bahasa Minang diasosiasikan dengan kekuatan ekonomi lokal. Bahasa Melayu, dalam kerangka ini, terdesak secara simbolik, bahkan di mata para penuturnya sendiri.

Dalam kondisi seperti ini, bahasa tidak hanya kehilangan fungsi komunikatif, tetapi juga kehilangan nilai tukar sosial dalam pasar simbolik masyarakat. Ketika bahasa tidak lagi dianggap “berguna”, “berdaya jual”, atau “memiliki prestise” dalam ranah ekonomi, pendidikan, maupun status sosial, maka kemungkinan besar bahasa itu akan ditinggalkan—termasuk oleh mereka yang secara genealogis dan kultural paling dekat dengannya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pelestarian bahasa bukan semata soal kebanggaan identitas, tetapi juga terkait erat dengan persepsi kegunaan dan pengakuan simbolik dalam struktur sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, *internalized shift* bukan hanya tanda lemahnya resistensi terhadap dominasi bahasa luar, tetapi juga bentuk legitimasi bawah sadar terhadap struktur sosial yang menempatkan bahasa sendiri dalam posisi subordinat. Ini menjadi tantangan serius dalam upaya pelestarian Bahasa Melayu, yang tidak cukup hanya dibangun melalui narasi kebanggaan kultural, tetapi harus ditopang oleh rekonstruksi nilai dan kegunaan bahasa itu sendiri dalam kehidupan sosial masyarakat kontemporer.

Lebih dari sekadar alat komunikasi, Bahasa Melayu dalam konteks masyarakat Duri telah menjelma menjadi arena perebutan identitas simbolik, di mana berbagai kelompok etnis dan keagamaan memproyeksikan makna, afiliasi, dan bahkan penolakan terhadap bahasa tersebut. Bahasa tidak lagi beroperasi dalam posisi netral, tetapi mengandung muatan ideologis yang sarat dengan penanda identitas. Siapa yang menggunakan Bahasa Melayu, dalam konteks apa, dan kepada siapa, kini menjadi bagian dari praktik representasi sosial yang kompleks—yang merefleksikan posisi, afiliasi, bahkan resistensi terhadap struktur sosial dan kultural yang ada.

Dalam masyarakat multietnis seperti Duri, Bahasa Melayu telah berubah dari simbol kebudayaan kolektif menjadi penanda eksklusivitas identitas, terutama karena kaitannya yang kuat dengan kelompok etnis Melayu-Muslim. Bagi sebagian kelompok, penggunaan Bahasa Melayu merupakan afirmasi terhadap nilai tradisional, agama, dan sejarah lokal. Namun, bagi kelompok lain, bahasa ini dipandang sebagai simbol dominasi kultural dan keagamaan yang mengancam ruang otonomi identitas mereka. Oleh karena itu, makna Bahasa Melayu tidak bersifat tunggal, tetapi terus dinegosiasikan tergantung siapa yang menggunakannya, dalam konteks interaksi seperti apa, dan bagaimana posisi sosial mereka dalam struktur masyarakat.

Dalam perspektif teori ideologi bahasa, kondisi ini menunjukkan bahwa bahasa adalah representasi kekuasaan yang tersembunyi, yang bekerja melalui simbol, asosiasi, dan praktik sehari-hari. Bahasa bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk dan mereproduksi hierarki sosial dan identitas kolektif (Mubaligh, 2011). Dengan demikian, studi

terhadap Bahasa Melayu di Kota Duri tidak hanya mengungkap gejala pergeseran bahasa secara linguistik, tetapi juga menyingkap bagaimana bahasa digunakan untuk menegosiasikan ruang, afiliasi, dan kekuasaan dalam masyarakat yang terus berubah (Muhammad Qhidir Bin Mat Isa, 2023).

Dalam situasi ini, bahasa tidak lagi berfungsi sebagai jembatan penghubung antarbudaya, tetapi justru mengalami transformasi menjadi pembatas simbolik antara “yang Islam” dan “yang bukan.” Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan seiring dengan menguatnya politik identitas berbasis agama, yang mulai merembes ke ruang-ruang sosial masyarakat secara lebih nyata dan terbuka. Bahasa, yang semestinya menjadi medium komunikasi lintas identitas, kini menjadi penanda keterpisahan dan eksklusivitas sosial—di mana pilihan bahasa mencerminkan afiliasi sekaligus perbedaan yang disengaja.

Sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu (2018), bahasa tidak pernah netral; ia selalu beroperasi dalam medan simbolik kekuasaan, di mana setiap kata, aksen, dan diksi adalah bagian dari strategi untuk mempertahankan atau menegosiasikan posisi sosial. Bahasa membawa serta nilai-nilai, legitimasi, dan otoritas yang diproduksi dalam konteks sosial tertentu. Dalam konteks Kota Duri, Bahasa Melayu tidak lagi sekadar alat tutur, tetapi telah menjadi representasi dari dominasi simbolik yang diasosiasikan dengan identitas Islam dan kelompok mayoritas.

Dalam kerangka ini, pilihan untuk tidak menggunakan Bahasa Melayu oleh kelompok non-Muslim dapat dibaca sebagai bentuk “perlawanan simbolik”—yakni resistensi terhadap dominasi ideologis yang mereka anggap hadir dalam bahasa tersebut. Penolakan ini bukan sekadar tindakan linguistik, melainkan bagian dari praktik sosial yang lebih luas, di mana bahasa digunakan sebagai alat untuk menegaskan batas, menjaga otonomi identitas, dan melawan simbol kuasa yang tidak mereka anggap sebagai milik mereka. Dengan demikian, bahasa menjadi tidak hanya wahana komunikasi, tetapi juga medan pertarungan sosial yang mempertaruhkan identitas, kuasa, dan legitimasi.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran Bahasa Melayu di Kota Duri tidak hanya dipicu oleh faktor demografis seperti migrasi dan heterogenitas etnis, tetapi juga oleh dinamika yang lebih kompleks, yakni ideologisasi bahasa, kontestasi identitas, serta relasi kuasa simbolik dalam masyarakat. Bahasa Melayu tidak lagi berfungsi sebagai medium komunikasi yang netral dan inklusif, melainkan telah mengalami transformasi menjadi simbol identitas keagamaan tertentu, khususnya Islam, yang berdampak pada penyempitan ruang fungsinya di ruang publik.

Melalui perspektif sosiolinguistik dan teori modal linguistik dari Pierre Bourdieu, penelitian ini menegaskan bahwa bahasa adalah bentuk kapital simbolik yang nilainya ditentukan oleh konteks sosial dan politik. Dalam kasus Kota Duri, Bahasa Melayu memiliki nilai tinggi di mata komunitas Muslim, namun mengalami delegitimasi di mata kelompok non-Muslim, yang memandang bahasa ini sebagai simbol dominasi budaya dan agama. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pemilihan dan penghindaran bahasa bukan hanya tindakan linguistik, tetapi juga strategi identitas.

Selaras dengan kerangka teoretis Joshua Fishman tentang *language shift*, Bahasa Melayu di Kota Duri mengalami peminggiran fungsi dalam domain vital seperti keluarga, pendidikan, dan ruang publik. Bahasa ini hanya bertahan di komunitas-komunitas tertutup, dan kehilangan peran sosial yang lebih luas. Bahkan dalam komunitas Melayu sendiri, terdapat

ambivalensi sikap terhadap penggunaan bahasa tersebut, yang menunjukkan bahwa pemertahanan bahasa tidak cukup hanya dilandasi kebanggaan simbolik, tetapi juga memerlukan persepsi fungsional serta dukungan struktural.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur sosiolinguistik Indonesia dengan memperlihatkan bagaimana ideologisasi agama dapat membentuk dinamika kebahasaan dalam masyarakat urban multiagama. Kasus Duri menjadi contoh konkret bagaimana bahasa lokal dapat berubah dari alat integrasi menjadi medan kontestasi simbolik dalam lanskap sosial yang majemuk.

Kasus Kota Duri memperlihatkan bahwa bahasa lokal bukan entitas netral, tetapi sarat dengan makna sosial dan politik. Bahasa Melayu, dalam hal ini, menjadi arena di mana identitas dinegosiasikan, resistensi dinyatakan, dan kuasa dipertahankan. Oleh karena itu, perlindungan dan revitalisasi bahasa daerah di Indonesia harus dirancang dengan memperhitungkan dinamika kuasa simbolik serta pluralitas sosial yang melingkupinya. Bahasa daerah tidak hanya perlu dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga harus diposisikan sebagai jembatan antar-identitas yang hidup dalam keberagaman, bukan sebagai tembok pemisah yang membekukan perbedaan.

Referensi

- Abd. Rahman Rahim, Arifuddin, A., Herman Tahir, & Hasnur Ruslan. (2023). Pola Pemertahanan Bahasa Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia di Belanda. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 9(2). <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2791>
- Achmad Dandy. (2021). Fenomena Bahasa di Masa Pandemi Virus Korona (Studi Sosiolinguistik). *Bahtera Indonesia; Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.31943/bi.v6i1.83>
- Allan, J. (2022). Foucault and his acolytes: Discourse, power and ethics. In *Social Theory and Education Research: Understanding Foucault, Habermas, Bourdieu and Derrida*. <https://doi.org/10.4324/9781003156550-5>
- Amin, M. F., & Suyanto, S. (2017). Pergeseran dan Pemertahanan Bahasa Ibu Dalam Ranah Rumah Tangga Migran di Kota Semarang. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 12(1). <https://doi.org/10.14710/nusa.12.1.15-26>
- Anggito, & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak.
- Astuti, T. (2019). Sikap dan Pemertahanan Bahasa Indonesia di Kalangan Akademisi (Tinjauan Deskriptif terhadap Fenomena Pemakaian Bahasa Indonesia). *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*.
- Ball, S. J. (2012). Foucault, power, and education. In *Foucault, Power, and Education*. <https://doi.org/10.4324/9780203078662>
- Bourdieu, P. (1993). The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature "Outline of Sociological Theory of Art Perception." In *New York: Columbia University Press*.
- Bourdieu, P. (2018a). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. In *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective*. <https://doi.org/10.4324/9780429494642-120>
- Bourdieu, P. (2018b). The forms of capital. In *The Sociology of Economic Life, Third Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780429494338>

- Bourdieu, P., & Passeron, J. (1990). Reproduction in education, culture and society. In *Trans. Nice, R. London: Sage*.
- Bredo, E., & Feinberg, W. (1979). Meaning, Power and Pedagogy: Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron, Reproduction in Education, Society and Culture†. *Journal of Curriculum Studies*, 11(4). <https://doi.org/10.1080/0022027790110405>
- Chong, K. H. (1998). What it means to be christian: The role of religion in the construction of ethnic identity and boundary among secondgeneration Korean Americans. *Sociology of Religion: A Quarterly Review*, 59(3). <https://doi.org/10.2307/3711911>
- Daulay, H. (2019). Toleransi Tanpa Batas: Outlook Agamawan dan Kebijakan Migrasi Suku Batak Kristen ke Pedalaman Duri Bengkalis. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/jpm.2019.031-01>
- Febrianto, A., Rakhmawati, A., & Saddhono, K. (2022). Dimensi Masalah Sociolinguistik. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 5(2). <https://doi.org/10.47647/jsh.v5i2.916>
- Fishman, J. A. (1967). Bilingualism With and Without Diglossia; Diglossia With and Without Bilingualism. *Journal of Social Issues*, 23(2), 29–38. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1967.tb00573.x>
- Fishman, J. A. (1968). Sociolinguistics: Proceedings of the UCLA sociolinguistics conference 1964. *Lingua*, 19(3–4), 428–432. [https://doi.org/10.1016/0024-3841\(68\)90122-8](https://doi.org/10.1016/0024-3841(68)90122-8)
- Foucault, M. (2021). Discipline and punish: The birth of the prison (an excerpt). In *Coronavirus, Psychoanalysis, and Philosophy: Conversations on Pandemics, Politics and Society*. <https://doi.org/10.4324/9781003150497-3>
- Haryo, S., Rono, S., & Amin, M. F. (2016). Bahasa dan Ideologi: Mengungkap Ideologi dan Kekuasaan Simbolik di Balik Penggunaan Bahasa (Kajian Teks Media melalui Analisis Wacana Kritis). *Humanika*, 19(1). <https://doi.org/10.14710/humanika.19.1.42-58>
- Hidayat. (2008). Akulturasi Islam dan Budaya Melayu: Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelalawan Provinsi Riau. In *Disertasi*.
- Hoffman, L. M., Lamont, M., & Fournier, M. (1993). Cultivating Differences: Symbolic Boundaries and the Making of Inequality. *Contemporary Sociology*, 22(6). <https://doi.org/10.2307/2076007>
- Holmes, J. (2013). *An Introduction to Sociolinguistics*. In *An Introduction to Sociolinguistics*. Longman.
- Idris Aman. (2000). Bahasa , Kuasa , dan Ideologi : Analisis Wacana Kritis Sebutan Baku Bahasa Melayu. *Akademika*, 56(Januari).
- Irvine, J. T., & Gal, S. (2000). Language Ideology and Linguistic Differentiation. *Regimes of Language: Ideologies, Politics and Identities*, 1979. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kamla, R. (2023). Strangers in the city: Spacing and social boundaries among accountants in the global city. *Contemporary Accounting Research*, 40(4). <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12879>
- Lamont, M. (2014). Reflections inspired by Ethnic Boundary Making: Institutions, Power, Networks by Andreas Wimmer. *Ethnic and Racial Studies*, 37(5). <https://doi.org/10.1080/01419870.2013.871312>
- Mahsun. (2012). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Rajawali Pers.
- Manaf, J. A., & Abu, R. (2011). Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, Perkamusan, dan Terjemahan. *Instutut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia*.

- Mubaligh, A. (2011). Relasi Bahasa dan Ideologi. *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 5(2).
<https://doi.org/10.18860/ling.v5i2.622>
- Muhammad Qhidir Bin Mat Isa. (2023). “Yang Indah-Indah”, Bahasa dan Ideologi dalam Pantun Perbahasan Parlimen Ke-14. *Journal of the Malaysian Parliament*, 3.
<https://doi.org/10.54313/journalmp.v3i.88>
- Nasution, Z. (2007). Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3).
<https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5897>
- Peter, R., & Simatupang, M. S. (2022). Keberagaman Bahasa Dan Budaya Sebagai Kekayaan Bangsa Indonesia. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sasta dan Budaya*, 9(1), 96–105.
<https://doi.org/10.33541/dia.v9i1.4028>
- Rahardi, K. (2001). *Sosiolinguistik, Kode dan Alih Kode*. Pustaka Pelajar.
- Sahril, N. (2018). Pergeseran Bahasa Daerah pada Anak-Anak di Kuala Tanjung Sumatra Utara. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 7(2). <https://doi.org/10.26499/rnh.v7i2.571>
- Sania, H., & Rusdi. (2022). Perkembangan Bahasa Melayu dalam Karya Sastra Raja Ali Haji. *Kronologi*, 4(3).
- Sitanggang, G. F. (2018). Pergeseran dan Pemertahanan Leksikon Lingkungan Kelautan Dalam Bahasa Pesisir Sibolga: Kajian Ekolinguistik. In *Tesis*.
- Suhandra, I. R. (2019). Hubungan Bahasa, Sastra, Dan Ideologi. *Cordova Journal : Language and Culture Studies*, 9(2). <https://doi.org/10.20414/cordova.v9i2.1613>
- Suharyo, Surono, & Amin, M. F. (2014). Bahasa dan Ideologi: Menungkap Ideologi dan Kekuasaan Simbolik di Balik Penggunaan Bahasa (Kajian Teks Media Melalui Analisis Wacana Kritis). *Humanika*, 19(1).
- Sumarsono. (2017). *Sosiolinguistik*. Pustaka Pelajar.
- Thomas, K. T. (2022). Bridging social boundaries and building social connectedness: Through youth development programs. *Equality, Diversity and Inclusion*, 41(7).
<https://doi.org/10.1108/EDI-02-2018-0019>
- Tilly, C. (2004). Social boundary mechanisms. *Philosophy of the Social Sciences*, 34(2).
<https://doi.org/10.1177/0048393103262551>
- Laengkang, A. G. (2017). Pengislaman Bahasa Melayu Dalam Kitab Pengetahuan Bahasa Oleh Raja Ali Haji. *Dibentangkan Dalam E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama Melayu Nusantara Kali Ke-2*.
<http://conference.kuis.edu.my/pantumn2017/index.php/prosiding>
- Wagiati, W. (2018). Pergeseran Bahasa Sunda dalam Leksikon Makanan Tradisional Sunda di Kabupaten Bandung dalam Perspektif Sosiolinguistik Mikro. *Metahumaniora*, 8(3).
<https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v8i3.20710>
- Wijana, I. D. P. (2018). Pemertahanan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. *Widyaparwa*, 46(1).